

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jenis organisasi ekonomi tertentu yang dikenal sebagai koperasi terdiri dari anggota yang merupakan orang atau organisasi lain yang diakui secara hukum dan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip ekonomi kekeluargaan dan kerakyatan.¹

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi khususnya berfungsi untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan dan sangat penting bagi perluasan perekonomian nasional. Asas Koperasi adalah aturan dasar yang berlaku bagi koperasi dan menjadi pedoman bagi kegiatannya. Ide-ide ini juga berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan komunal. Ide koperasi merupakan konsep dasar dari koperasi. Adanya prinsip koperasi inilah yang membedakan karakter koperasi sebagai pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya.²

Koperasi, sejenis organisasi ekonomi yang dibangun di atas asas kekeluargaan, bertujuan untuk menginspirasi anggota kelas menengah untuk secara aktif meningkatkan taraf hidup mereka. Masalah penting muncul ketika koperasi dengan segala keuntungannya merasa sulit untuk berkembang di Indonesia. Koperasi saat ini tertinggal jauh di belakang perusahaan swasta lainnya. Hal ini disebabkan oleh kesulitan yang dihadapi koperasi, termasuk kekurangan tenaga kerja, sumber daya, dan teknologi. Selain itu juga, banyak badan usaha koperasi yang tidak melanjutkan usahanya karena kurangnya kemampuan analisis dan kurangnya kemampuan pengembangan usaha. Jadi

¹ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 32.

² *Ibid.*

beberapa koperasi yang tumbuh atau mati dengan cepat disebabkan oleh kepemimpinan yang tidak profesional.¹

Koperasi dinilai berhasil jika mampu meningkatkan taraf hidup para anggotanya. Karena anggotanya membawa nilai bagi bisnis koperasi mereka, koperasi dapat membantu keberhasilan anggotanya. Dalam situasi ini, kapasitas koperasi untuk mengembangkan anggotanya meningkat secara proporsional dengan seberapa berhasilnya menjalankan bisnis. Lingkup keterlibatan kegiatan koperasi meningkat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Keterlibatan anggota, efektivitas koperasi, dan kesejahteraan anggota karena semuanya terkait. Koperasi dapat dibedakan berdasarkan anggotanya, seperti pemilik dan konsumen jasa, bila tidak dimiliki oleh jenis usaha lain. Mereka sangat penting secara strategis untuk pertumbuhan koperasi.²

Sebagai organisasi sosial dan ekonomi, koperasi berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Namun dalam hal kebutuhannya akan jasa akuntansi, koperasi juga membutuhkan jasa akuntansi, yang tidak hanya mengolah data keuangan tetapi juga menghasilkan informasi keuangan, mengembangkan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap praktik manajemen usaha. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap laporan keuangan sangatlah penting, karena kesalahpahaman terhadap laporan keuangan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah dan bisa mengakibatkan kebangkrutan pada koperasi.

Dengan mengkaji analisis sumber dan penggunaan modal kerja, kita dapat melihat apakah tingkat modal kerja koperasi mengalami penurunan atau peningkatan. Berbagai jenis koperasi telah berkembang pesat, seperti koperasi pegawai Negeri, koperasi pedesaan, koperasi multi industri, bahkan koperasi

¹ Lilik Hardiningsih, 'Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad) Kartika Benteng Di Balikpapan', *Adminika*, volume 2, Desember (2016), h. 2.

² Reza Nurul Ichsan, Sarman Sinaga, and Lukman Nasution, *Ekonomi Koperasi Dan UMKM*, ed. Ali Mukti Tanjung, 1st ed. (Medan: Sentosa Deli Medan, 2021), h. 2.

simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memiliki fitur khusus yang dirancang untuk memungkinkan pemilik usaha kecil menyediakan dana tanpa agunan.³

Koperasi dianggap sangat dibutuhkan di negara berkembang untuk membangun lembaga yang dapat menjadi mitra nasional bagi pembangunan kepentingan bersama. Namun, Indonesia adalah negara berkembang dengan tantangan pembangunan yang dibawa oleh pengaruh domestik dan eksternal. Masalah internal biasanya muncul tidak hanya dalam manajemen dan keanggotaan itu sendiri, tetapi juga dalam masalah modal, dan faktor eksternal yaitu asumsi orang tentang pesaing dan kerjasama yang sangat buruk.⁴

Secara historis, persyaratan untuk menyusun laporan tersebut termasuk dalam GAAP Indonesia. Ini mengadopsi Prinsip Akuntansi yang Diterima Umum AS (US GAAP). PSAK No. 27 sejak itu berganti nama menjadi Laporan Unit Akuntansi Keuangan, yang berisi aturan dan standar koperasi, dan akhirnya dicabut Standar Akuntansi. Setelah penerapan IFRS, Peraturan tentang Penyusunan Laporan Keuangan dibagi menjadi 43 Standar Akuntansi, 8 Standar Akuntansi Syariah, 11 Interpretasi Akuntabilitas Publik (UKM SAK ETAP), dan SAK ETAP Peraturan Koperasi mengikuti penerapan IFRS.⁵

Dewan Standar Akuntansi Keuangan nomor 27 menerima Surat Pernyataan Pembatalan Rancangan Standar Akuntansi Keuangan yang membahas joint accounting pada tanggal 23 Oktober 2010, sebagai tanggapan atas pesatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia. SAK yang terkait dengan sektor tersebut juga harus diakhiri jika PSAK No. 27 dibatalkan. Untuk mengaktifkan kontrol oleh SAK lain, ini dilakukan.

Standar akuntansi untuk bisnis yang laporan keuangannya tidak dipublikasikan telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Bisnis

³ Yuhanes Juan Huvat, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi CU (Credit Union) Daya Lestari Di Samarinda," *Ekonomia* Vol 6, No (2017): 2.

⁴ Wawan Ardiansyah, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Terhadap Laporan Keuangan Koperasi Kharisma Di Kota Pekanbaru 2016-2017" (UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

⁵ Mulyati, "Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada KPRI Pengayoman 1 Lapas Dompui," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 4 No., no. April (2020): 2.

legal yang menawarkan laporan keuangan umum kepada pelanggan di luar perusahaan dan memiliki sedikit kewajiban publik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepada publik. Contoh individu yang tidak terlibat aktif dalam koperasi perusahaan muncul dalam pikiran sebagai pemilik, kreditur, dan lembaga pemerangkat.

SAK ETAP berlaku untuk pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Entitas harus menggunakan SAK ETAP sekali lagi untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010, meskipun telah digunakan sebelumnya. Laporan keuangan memberi pelanggan akses ke data keuangan tentang bisnis dan berharga bagi banyak pengguna, termasuk mereka yang tidak dapat meminta laporan keuangan tertentu untuk memenuhi persyaratan informasi spesifik koperasi. Sebagai bagian dari pencapaian tujuan tersebut, laporan keuangan tahunan setidaknya harus memuat kinerja operasional atau akuntabilitas manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, beserta data pembanding. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi lainnya. Kekhususan informasi (SAK ETAP paragraf 2.1).⁶

Hanya 60% koperasi di Indonesia, menurut penelitian Ikatan Akuntan Indonesia, yang memiliki Rapat Anggaran Tahunan (RAT), dan relatif sedikit koperasi yang memberikan laporan keuangan secara mendalam. Karena kurangnya sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi dalam akuntansi koperasi di bawah SAK ETAP belum dilakukan dengan tepat.

Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjalankan tugasnya dengan kompeten untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengevaluasi kemampuan sumber daya manusia, kita harus mengetahui standar dan tolak ukurnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana laporan keuangan dibuat, diharapkan staf koperasi akan menerapkan undang-undang dan peraturan,

⁶ Neneng Salmiah, "Analisis Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Oublik (Pada UMKM Di Kecamatan Sukajadi Binaan Diskop & UMKM Kota Pekanbaru)," *Akuntansi* Vol 3 No., no. April (2025): 3.

terutama SAK ETAP, dan standar akuntansi, dan menghasilkan laporan keuangan koperasi dan operasional yang lebih rinci.

Karena ketidaktahuan anggota dan manajer tentang tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan, beberapa koperasi telah gagal. Koperasi yang bangkrut seringkali hanya mengandalkan uang pemerintah, yang tidak dapat dijamin untuk menjalankan bisnis koperasinya dengan sukses. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa SAK ETAP bahkan tidak digunakan untuk membuat laporan keuangan.⁷

Pembuatan laporan keuangan dalam akuntansi rentan terhadap perbedaan dan kesalahan. Industri akuntansi telah menciptakan seperangkat standar dan prosedur yang dikenal sebagai prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) untuk mengurangi risiko ini. Garis besar gagasan akuntansi ini disediakan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. Standar Akuntansi adalah pedoman utama yang harus diikuti semua perusahaan saat membuat catatan keuangan mereka.⁸

Koperasi didukung oleh iuran anggotanya, sehingga SAK ETAP dapat dimanfaatkan untuk menjamin keakuratan pelaporan keuangannya. Laporan adalah satu-satunya informasi yang diberikan kepada anggota koperasi. Koperasi juga tidak memiliki saham, atau obligasi untuk kepentingan umum.

Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang menyediakan jasa asuransi dan keuangan. Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello merupakan salah satu dari forum yang mengorganisir serikat pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Secara khusus, ini memotivasi anggota serikat untuk menghasilkan pendapatan tambahan dengan mengangkat diri mereka sendiri dari kemiskinan. Penyajian laporan keuangan Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello ditemukan

⁷ Erma Suryanti, Irianing Suparlinah, and I wayan Mustika, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Pada Koperasi Di Eks-Karisedenan Banyumas," *Akuntabel* (2015): 89, <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/akuntabel/article/view/537>.

⁸ Mulyani, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjungpinang Dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjungpinang," *Theoretical and Applied Genetics* 7, no. 2 (2010): 1–7.

permasalahan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Koperasi terkhusus untuk tahun 2021 hanya menyajikan 2 komponen laporan keuangan yakni neraca dan laporan laba rugi.⁹ Koperasi wajib menerima laporan keuangan secara menyeluruh, yang harus disusun dengan menggunakan neraca, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, mengikuti SAK ETAP dan Peraturan Menteri K-UKM No. 12 Tahun 2015. Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang tepat dan komprehensif kepada semua pemangku kepentingan sekaligus menguraikan kemampuan bersama secara keseluruhan.¹⁰

Sebagai organisasi kepentingan publik, Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello harus dikelola secara professional sesuai dengan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas yang diakui, diterima dan dipercaya oleh anggotanya dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello harus mampu menerapkan informasi akuntansi secara benar dan tepat. Informasi akuntansi yang andal adalah alat manajemen yang efektif untuk mengelola dan mengendalikan proses bisnis.

Melalui penggunaan informasi akuntansi keuangan, manajemen dan pihak eksternal melakukan perencanaan yang komprehensif, evaluasi kinerja, pengambilan keputusan strategis dan tujuan lainnya. Dalam mengelola Koperasi Credit Union kasih Setia Pulau Tello sebagai pengguna internal, informasi akuntansi tidak hanya sebagai alat pelaporan sebagai pemilik (anggota) dalam rapat anggota, tetapi juga merupakan alat evaluasi kinerja dan alat pengendalian untuk penyusunan dan perencanaan rencana kerja, serta sebagai informasi. Pengguna eksternal menggunakan informasi akuntansi keuangan sebagai dasar untuk menilai kinerja manajer, menyalurkan kredit ke lembaga keuangan, membayar zakat, infaq dan sedekah, dan dukungan lainnya.¹¹

⁹ Sumber: Wawancara dengan Bapak Firman Sarumaha, Ketua Koperasi CU Kasih Setia Pulau Tello

¹⁰ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah Republik Indonesia Nomor 12/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Panduan Umum Akuntansi Koperasi

¹¹ Wakhdan and Galuh Aditya, "Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo," *Prosiding Seminar Nasional Unimus* 2 (2019): h. 256–266.

Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello bagi perkembangan Akuntansi Syariah yaitu sebuah unit usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, mewujudkan kontribusi dana dalam porsi yang sama. Masing-masing dari anggota sama-sama memikul hak dan kewajiban satu sama lain. Kondisi Koperasi ini dalam perkembangan Akuntansi Syariah juga menggunakan prinsip pertanggungjawaban dalam menyusun laporan keuangannya. Selain itu digunakan prinsip keadilan, didalam pencatatan apabila tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka akan merugikan diantara salah satu pihak. Tidak hanya itu, prinsip kebenaran juga diperlukan, untuk menyajikan laporan keuangan baik bulanan ataupun tahunan dibuat secara benar.

Peneliti harus menyelidiki lebih lanjut dalam konteks tersebut di atas untuk memastikan bagaimana Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello menyusun laporan keuangannya dan apakah sesuai dengan standar yang bersangkutan, dalam hal ini Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello”**.

B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah berikut ditemukan dalam penelitian ini mengingat konteks yang disebutkan pada latar belakang masalah di atas:

1. Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello belum menyusun Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Ketidaksihesuaian dalam penyusunan laporan keuangan menurut SAK ETAP.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan penemuan identifikasi masalah tersebut di atas, peneliti akan fokus pada area masalah yang lebih kecil. Pembatasan masalah dalam penenelitian ini yang dibahas semata-mata berdasarkan penyajian Laporan Keuangan Koperasi tahun 2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti merumuskan masalah, yang akan dibahas dan dirinci dalam skripsi ini. Pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello?
2. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada bagaimana masalah tersebut di atas dirumuskan, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan referensi lebih lanjut tentang investigasi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Hasil penelitian ini seharusnya memungkinkan peneliti untuk lebih memahami bagaimana SAK ETAP digunakan dan bagaimana ilmu akuntansi berkembang di bidang ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Secara khusus, pembukuan koperasi yang diadakan di Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello menjadi fokus penelitian ini, yang mencoba menjelaskan bidang akuntansi

b. Bagi Koperasi

Perencanaan masa depan dan kesiapan kebijakan ditingkatkan dengan mengidentifikasi efisiensi dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan koperasi sebagai kontribusi untuk manajemen koperasi.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber data lebih lanjut dan sebagai titik referensi dalam penelitian lain pada subjek yang sama.

d. Untuk Masyarakat Luas

Salah satu cara untuk memudahkan masyarakat dalam memahami status keuangan koperasi adalah melalui penelitian ini, khususnya laporan tahunan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN